



Laporan Kinerja 2025

**BADAN
RISET DAN
INOVASI
DAERAH
PROVINSI
JAMBI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja (LKj) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi Tahun 2025** dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan BRIDA sepanjang tahun anggaran 2025, sekaligus menjadi instrumen evaluasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam bidang riset dan inovasi, BRIDA Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah melalui kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari berbagai bidang, antara lain:

- **Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, yang mendukung kelancaran operasional, administrasi, serta pemeliharaan aset dengan tingkat efisiensi tinggi.
- **Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang menghasilkan kajian strategis di sektor pemerintahan, sosial, ekonomi, dan pembangunan dengan capaian hampir sempurna.
- **Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi**, yang berhasil mendorong penerapan model inovasi, diseminasi hasil riset, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta kontribusi BRIDA terhadap pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana refleksi atas berbagai tantangan yang dihadapi, seperti perlunya peningkatan koordinasi lintas unit, perbaikan akurasi perencanaan kebutuhan pegawai, serta optimalisasi program pengembangan sumber daya manusia.



Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan program BRIDA Provinsi Jambi Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, inspirasi, dan pedoman dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta memperkuat daya saing daerah menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan.



Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jambi

I. H. Sri Argunaini, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660722 199303 2 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Gambaran Umum

Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran. BRIDA memiliki mandat strategis dalam bidang riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah berbasis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Capaian Utama

- Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: mendukung kelancaran operasional, administrasi, serta pemeliharaan aset dengan tingkat efisiensi tinggi.
- Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah: menghasilkan kajian strategis di sektor pemerintahan, sosial, ekonomi, dan pembangunan dengan capaian hampir sempurna.
- Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi: mendorong penerapan model inovasi, diseminasi hasil riset, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.

Kondisi Organisasi dan SDM

- Struktur organisasi terdiri dari Kepala, Sekretariat, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Jumlah pegawai per 31 Desember 2025 sebanyak **40 orang** (17 laki-laki dan 23 perempuan), dengan dominasi pegawai golongan III (67,5%).
- Masih terdapat kesenjangan pemenuhan jabatan fungsional tertentu, terutama peneliti, sehingga penguatan kapasitas SDM menjadi prioritas.

Sarana dan Prasarana

- BRIDA memiliki sarana prasarana berupa kendaraan dinas, peralatan kantor, komputer, dan gedung.
- Kondisi sebagian besar aset masih baik, namun terdapat penurunan kualitas pada beberapa fasilitas seperti gedung dan alat komunikasi.



- Pemeliharaan rutin dan rehabilitasi diperlukan untuk menjaga kualitas operasional.

Permasalahan Utama

- Keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai fungsional tertentu.
- Penurunan kualitas sarana prasarana yang berpotensi menghambat kinerja.
- Perlunya peningkatan koordinasi lintas unit dan akurasi perencanaan kebutuhan pegawai.

Perencanaan Kinerja

- Perencanaan kinerja BRIDA selaras dengan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026.
- Tujuan utama: **Terciptanya Ekosistem Inovasi di Provinsi Jambi.**
- Sasaran: **Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.**
- Indikator kinerja: persentase kebijakan berbasis bukti.

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Gubernur Jambi 2029: *“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT.”*

Misi utama:

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Memantapkan daya saing daerah dan produktivitas sektor unggulan.
3. Memantapkan keberlanjutan pembangunan dan kualitas SDM.

Kesimpulan

LKj BRIDA Provinsi Jambi Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang signifikan dalam mendukung pembangunan berbasis riset dan inovasi. Namun, tantangan utama berupa keterbatasan SDM fungsional, penurunan kualitas sarana prasarana, serta perlunya peningkatan koordinasi internal masih harus diatasi.



Laporan ini menjadi instrumen evaluasi sekaligus pedoman untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan daya saing daerah menuju pembangunan berkelanjutan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
Gambaran Umum.....	iii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Gambaran Umum	3
1.2. Tugas dan Fungsi	3
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Komposisi Pegawai.....	10
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	13
1.6. Permasalahan Utama.....	14
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
1.1. Perencanaan Kinerja	17
1.1.1. Tujuan dan Sasaran Balitbangda dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	18
1.1.2. Tujuan dan Sasaran BRIDA dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	19
1.1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	20
1.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan.....	24
1.1.5. Perjanjian Kinerja	28
1.1.6. Program dan Kegiatan	29
1.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A. Capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025	37
B. Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV PENUTUP	54
Lampiran I Perjanjian Kinerja.....	57
Lampiran II Realisasi Capaian Kinerja BRIDA Provinsi Jambi	61
Lampiran III Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	59
Lampiran IV Kegiatan BRIDA Tahun 2025	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2025	10
<i>Tabel 2 Profil Kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2025</i>	11
Tabel 3 Profil Kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2025	11
Tabel 4 Daftar Sarana dan Prasarana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.....	13
Tabel 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026.....	21
Tabel 6 Sasaran dan Arah Kebijakan BRIDA Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	24
Tabel 7 Perbandingan Anggaran Murni dan Perubahan BRIDA Tahun 2025	30
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Kepala Balitbangda Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	34
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Kepala BRIDA Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	34
Tabel 10 Skala Pengukuran Kinerja	37
Tabel 11 Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama	38
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Utama	40
Tabel 13 Tabel 1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BRIDA Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2025	50
Tabel 14 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan BRIDA Provinsi Jambi Tahun 2025	61
Tabel 15 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025	59
Bagan 1 Perjanjian Kinerja (Awal) Kepala BRIDA Provinsi Jambi	57
Bagan 2 Perjanjian Kinerja (Awal) Kepala BRIDA Provinsi Jambi (Lampiran)	58
Bagan 3 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kepala BRIDA Provinsi Jambi.....	59
Bagan 4 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kepala BRIDA Provinsi Jambi (Lampiran)	60
Bagan 5 Penyerahan Kajian Kebijakan Deputi Riset dan Inovasi Daerah Kepada Pemerintah Daerah.....	65
Bagan 6 Penganugerahan Kinerja dalam Bidang Inovasi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Tugas dan Fungsi

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemaian ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- i. pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Kepala, Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi dikepalai oleh seorang Kepala Badan (Pejabat Eselon II). Sekretariat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam Internal Badan Riset dan Inovasi Daerah dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat berfungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan,

- pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. perencanaan, koordinasi pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi dan data serta mengoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF substansi;
 - c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset, urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;



- c. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
- d. penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, humas, dan keprotokolan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan administrasi kepegawaian;
- g. penyelenggaraan urusan dokumentasi dan informasi umum dan kepegawaian;
- h. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja Pegawai ASN; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada sekretariat terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Program; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, Penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi terdiri dari:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam melaksanakan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di Daerah dalam melaksanakan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

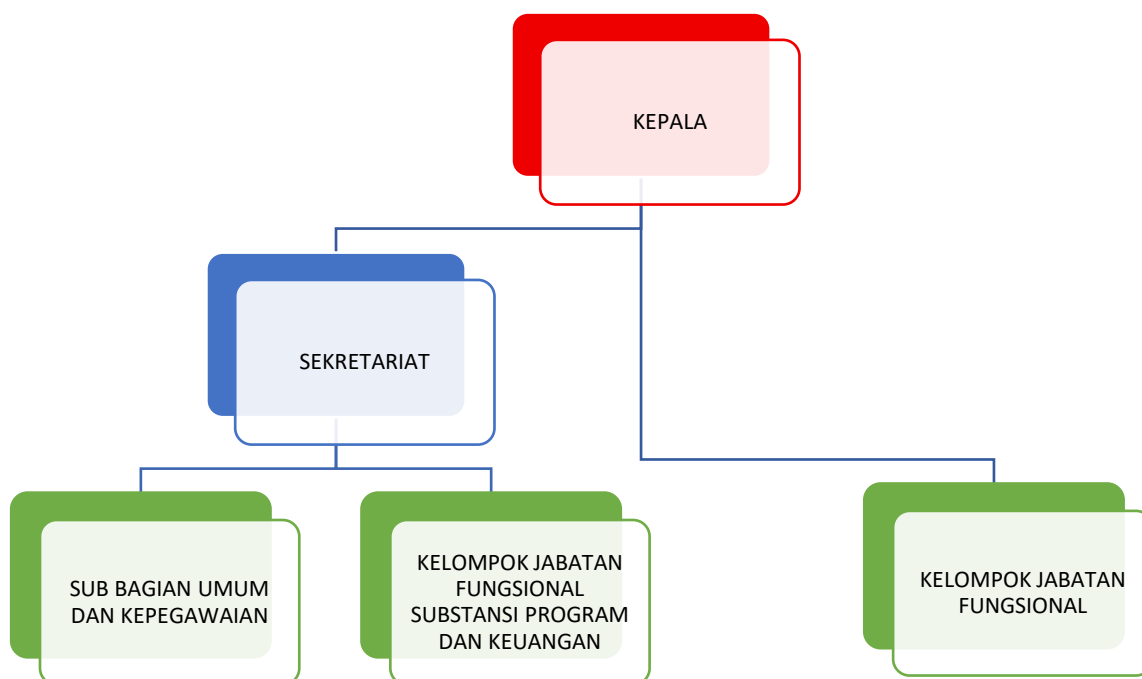
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di Daerah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
- e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi, pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

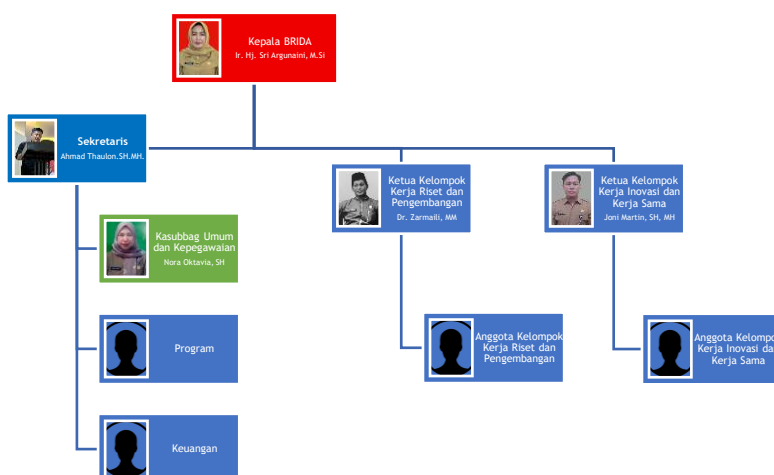
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja atau kelompok kerja guna mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Lebih lanjut, tim kerja atau kelompok kerja minimal, Gambar 2 Tim Kerja atau Kelompok Kerja Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi, terdiri atas ketua tim dan anggota tim. Ketua tim dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi



Gambar 2 Tim Kelompok Kerja Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi



1.4. Komposisi Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi Sumber Daya Manusia di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 1 Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2025

NO.	STRUKTUR JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	1	-	1
3.	Eselon IV	-	1	1
JUMLAH		1	2	3

Sumber: BRIDA Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi hanya terdapat 3 orang pejabat eselon. 3 orang pejabat

eselon tersebut terdiri dari satu orang pejabat eselon II, satu orang pejabat eselon III dan satu orang pejabat eselon IV.

Tabel 2 Profil Kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2025

NO.	JENIS JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	STRUKTURAL	1	2	3
2.	JF PENELITI	2	4	6
3.	JF ARSIPARIS	0	1	1
4.	JF ANALIS DATA ILMIAH	0	1	1
5.	JF ANALIS KEBIJAKAN	4	3	7
6.	JF PERENCANA	0	1	1
7.	JF UMUM	9	11	20
JUMLAH		14	21	39

Sumber: BRIDA Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2 di atas terlihat masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional tertentu dimana sebagian besar pegawai masih menduduki jabatan fungsional umum. Ada satu orang Fungsional Peneliti yang sedang Tugas Belajar, penambahan jabatan fungsional peneliti sangat diperlukan agar memberikan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi secara maksimal.

Tabel 3 Profil Kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2025

NO.	JENIS GOLONGAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	GOLONGAN I	0	0	0
2.	GOLONGAN II	1	0	1
3.	GOLONGAN III	9	18	27
4.	GOLONGAN IV	7	5	12
JUMLAH		17	23	40

Sumber: BRIDA Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2025, jumlah pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi tercatat sebanyak **40 orang**, dengan komposisi **17 laki-laki (42,5%)** dan **23 perempuan (57,5%)**. Secara umum, struktur kepegawaian menunjukkan kecenderungan dominasi pegawai perempuan, yang memberikan gambaran adanya keseimbangan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

1.4.1.1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan I: Tidak terdapat pegawai, menunjukkan bahwa rekrutmen lebih difokuskan pada tenaga dengan kualifikasi pendidikan menengah ke atas.

Golongan II: Terdapat 1 orang pegawai (laki-laki), dengan proporsi yang sangat kecil terhadap total pegawai.

Golongan III: Menjadi kelompok terbesar dengan **27 orang pegawai** (9 laki-laki dan 18 perempuan), atau sekitar **67,5% dari total pegawai**. Hal ini menandakan bahwa BRIDA Jambi bertumpu pada pegawai level menengah yang berperan sebagai pelaksana teknis maupun staf fungsional.

Golongan IV: Terdapat **12 orang pegawai** (7 laki-laki dan 5 perempuan), atau sekitar **30% dari total pegawai**, yang umumnya menduduki jabatan struktural maupun fungsional senior.

1.4.1.2. Analisis Komposisi Gender

Proporsi pegawai perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dengan selisih 6 orang. Kondisi ini mencerminkan adanya keterwakilan perempuan yang cukup signifikan dalam struktur organisasi BRIDA Jambi. Hal tersebut dapat menjadi indikator positif dalam mendukung kebijakan kesetaraan gender di lingkungan pemerintahan daerah.

1.4.1.3. Implikasi terhadap Kelembagaan

Ketiadaan pegawai Golongan I menunjukkan bahwa BRIDA Jambi tidak lagi bergantung pada tenaga dengan kualifikasi dasar, melainkan lebih menekankan pada tenaga profesional dengan pendidikan menengah dan tinggi.

Dominasi Golongan III menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BRIDA Jambi sangat bergantung pada pegawai level menengah, sehingga penguatan kapasitas dan kompetensi pada golongan ini menjadi prioritas penting.

Komposisi gender yang relatif seimbang dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam kegiatan riset dan inovasi daerah.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi saat ini telah mengalami penurunan kualitas namun masih memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4 Daftar Sarana dan Prasarana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1.	Alat-alat angkutan	23 Unit	
	Kendaraan Roda 4	9 Unit	Baik
	Kendaraan Roda 2	14 Unit	Baik
2.	Alat-alat Pertanian dan Peternakan	1	
3.	Alat kantor dan rumah tangga	660 Jenis	
4.	Alat studio dan alat komunikasi	2 Jenis	1 Rusak
5.	Komputer	87 Jenis	
6.	Bangunan Gedung	1 Unit	Baik
7.	Alat-alat Kesehatan	2 jenis	Baik

Sumber: BRIDA Provinsi Jambi, 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BRIDA Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan

(rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6. Permasalahan Utama

Permasalahan Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia pada BRIDA Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan fungsional yang berpotensi menghambat optimalisasi peran kelembagaan sebagai penggerak riset dan inovasi daerah. Permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kesenjangan Jabatan Fungsional Keahlian

Ketersediaan SDM pada jabatan fungsional kunci seperti peneliti, analis data ilmiah, dan perencana masih terbatas. Akibatnya, beban kerja menjadi tidak proporsional, kualitas kajian berpotensi menurun, serta terdapat ketergantungan pada pihak eksternal dalam pelaksanaan penelitian tertentu.

2. Ketidakseimbangan Komposisi Jabatan

Struktur kepegawaian masih didominasi oleh jabatan fungsional umum dibandingkan jabatan fungsional teknis/keahlian. Kondisi ini menyebabkan fungsi riset dan inovasi belum didukung secara optimal oleh tenaga profesional, kegiatan administratif lebih dominan, serta kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan output berbasis ilmu pengetahuan menjadi terbatas.

3. Kapasitas dan Kompetensi SDM Belum Optimal

Program pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan belum mencapai target maksimal. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya penguasaan metode penelitian, analisis data, dan inovasi teknologi, sehingga terdapat kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi berbasis *knowledge institution*.

4. Perencanaan Kebutuhan SDM yang Kurang Akurat

Perencanaan kebutuhan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil. Formasi jabatan fungsional prioritas belum terpenuhi, proyeksi kebutuhan SDM berbasis beban kerja dan arah kebijakan riset daerah masih

terbatas, serta manajemen talenta belum berjalan optimal dalam mendukung pengembangan karier pegawai.

5. Dampak terhadap Kinerja Organisasi

Keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan kajian strategis yang berkualitas dan tepat waktu. Peran BRIDA sebagai *think-tank* pemerintah daerah belum maksimal. Akselerasi pengembangan dan hilirisasi inovasi daerah berjalan lambat akibat keterbatasan SDM.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKj Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan tentang alasan disusun LKj/manfaat LKj, penjelasan umum perangkat daerah dengan penekanan pada aspek strategis organisasi seperti tugas dan sasaran sebagaimana penjabaran visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh perangkat daerah dan Sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, tabel perjanjian kinerja. Penjelasan apakah ada perbedaan antara target kinerja pada renja Tahun 2025 dengan yang di perjanjian kinerjanya Tahun 2024.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.1. Perencanaan Kinerja

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi, yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), memiliki mandat strategis untuk mendukung pembangunan daerah melalui riset, kajian kebijakan, dan inovasi. Peran BRIDA mengalami transformasi seiring perubahan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029.

Dalam menjalankan mandat strategis tersebut, BRIDA Provinsi Jambi memerlukan perencanaan kinerja yang terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Perencanaan kinerja menjadi landasan utama dalam menerjemahkan tugas dan fungsi BRIDA ke dalam program, kegiatan, serta target kinerja yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berbasis riset dan inovasi.

Perencanaan kinerja BRIDA Provinsi Jambi disusun sebagai bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dokumen perencanaan menjadi pedoman dalam mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, perencanaan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat manajerial untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan berbasis riset dan inovasi.

Perencanaan kinerja BRIDA Provinsi Jambi menekankan pada keterpaduan antara kebijakan riset dan inovasi dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diteruskan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Selain itu, perencanaan diarahkan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang optimal. Perencanaan kinerja juga berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-

based policy), yang memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Di samping itu, BRIDA berupaya memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing.

1.1.1. Tujuan dan Sasaran Balitbangda dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, BRIDA (sebelumnya Balitbangda) memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berbasis bukti. Salah satu tujuan utama yang diemban adalah penguatan tata kelola pemerintahan berbasis riset dan data, di mana BRIDA diarahkan untuk berfungsi sebagai pusat kajian (think tank) pemerintah daerah yang menyediakan berbagai hasil penelitian, analisis, dan rekomendasi kebijakan sebagai landasan pengambilan keputusan pembangunan.

Selain itu, BRIDA juga berfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penelitian daerah. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan metodologi penelitian yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan, peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang riset dan inovasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan guna mendukung pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan secara lebih efektif dan profesional.

Dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, BRIDA berperan menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai program prioritas daerah. Peran tersebut menjadi semakin penting dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan, termasuk digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, serta upaya mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran strategis BRIDA dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diarahkan pada tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan berbasis hasil penelitian, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan hasil kajian ilmiah, serta terbangunnya kapasitas kelembagaan riset dan inovasi di tingkat provinsi. Pencapaian sasaran tersebut diharapkan dapat memperkuat peran BRIDA sebagai institusi pendukung pembangunan daerah yang mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

1.1.2. Tujuan dan Sasaran BRIDA dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, peran BRIDA semakin diperkuat sebagai motor penggerak riset dan inovasi daerah yang mendukung peningkatan daya saing serta pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama yang ditetapkan adalah mewujudkan ekosistem inovasi daerah yang berdaya saing melalui penguatan sinergi antara kegiatan riset, pengembangan teknologi, dan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, BRIDA diarahkan untuk bertransformasi menjadi pusat inovasi daerah yang mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dengan pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi dan sosial sebagai pendorong pertumbuhan daerah.

Selanjutnya, BRIDA juga memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan riset terapan yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan potensi lokal. Kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, industri kecil dan menengah, pariwisata, serta pengembangan teknologi tepat guna yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan dunia usaha. Melalui pendekatan tersebut, hasil riset diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan, tetapi juga mampu mendorong terciptanya inovasi yang dapat diterapkan secara langsung dalam pembangunan daerah.

Selain itu, BRIDA berperan sebagai fasilitator dan penghubung dalam penguatan kolaborasi riset dan inovasi antar pemangku kepentingan. Peran ini diwujudkan melalui pembangunan jejaring kerja sama yang melibatkan

pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan inovasi yang relevan, aplikatif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran strategis BRIDA dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan riset terapan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. Sasaran lainnya meliputi penguatan inovasi di bidang kesehatan, khususnya dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, serta pengembangan pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Di samping itu, BRIDA juga berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Seluruh upaya tersebut didukung melalui penguatan kolaborasi riset dan inovasi lintas sektor guna meningkatkan daya saing daerah, mempercepat transformasi pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi secara berkelanjutan.

1.1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jambi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 berfokus pada kelanjutan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dari periode sebelumnya (2016-2021). Tujuan utamanya adalah melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan sebelumnya dan mempersiapkan arah pembangunan untuk periode 2025-2029. Visi Gubernur Jambi untuk tahun 2029 adalah "Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT." Visi ini menegaskan komitmen untuk membangun Provinsi Jambi yang mantap dalam segala aspek, memiliki daya saing yang kuat, serta pembangunan yang berkelanjutan dengan landasan spiritual dan nilai-nilai keagamaan.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan 3 Misi, antara lain:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;

2. Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata; dan
3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dirangkum dalam tabel RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

Visi: Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif	Indeks RB	Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital	• Nilai SAKIP • Indeks Integritas Nasional • Survei Penilaian Integritas (SPI) • Indeks SPBE • Indeks Pelayanan Publik • Indeks Keterbukaan Informasi
2	Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	• Rasio Konektivitas • Indeks Daya Saing Infrastruktur
				Terwujudnya Transformasi digital di Provinsi Jambi	• Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi



					Jambi • Tingkat inklusi keuangan Provinsi • Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi	• Inflasi • Rasio kapasitas fiskal daerah • Pertumbuhan Ekonomi • Tingkat Pengangguran Terbuka • Indeks Ketahanan Pangan • Incremental Capital Output Ratio (ICOR) • PDRB Per kapita (juta rupiah per kapita per tahun)
				Meningkatnya Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan Industri dan Pariwisata	• Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum • Distribusi PDRB sektor tersier • Rasio PDRB Industri • Pengolahan

					Pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan
				Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi	Indeks Inovasi Daerah
3	Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sistem perekonomian yang Rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial	Indeks Ekonomi Hijau	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan
				Menurunnya ketimpangan pendapatan	Rasio Gini
				Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)
			Indeks Ekonomi Biru	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Distribusi sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(%)
					- Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari - Persentase Penduduk

					miskin ekstrem di wilayah Pesisir (%)
		Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkesetaraan gender	Indeks Modal Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	• Usia Harapan Hidup • Prevalensi Stunting
				Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat serta pengarusutamaan gender	• Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
					• Indeks Pembangunan Kebudayaan
					• Indeks Ketimpangan Gender

Sumber: RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029

1.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Sasaran dan Arah Kebijakan BRIDA Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung pembangunan Daerah	Meningkatnya persentase kajian yang dimanfaatkan	1. Menyusun prioritas kajian yang selaras dengan isu strategis pembangunan daerah. 2. Meningkatkan keterlibatan pengguna (perangkat daerah/instansi terkait) sejak tahap	1. Mendorong pemanfaatan hasil kajian dan riset untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah. 2. Memperkuat sinergi antara BRIDA, perangkat daerah,

No .	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perencanaan kajian. 3. Mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk penyimpanan, dokumentasi, dan akses hasil kajian. 4. Melakukan sosialisasi, seminar, dan forum diseminasi untuk memperluas pemanfaatan hasil riset. 5. Memperkuat kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, lembaga riset nasional, dan sektor swasta. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil kajian secara berkala. 7. Menyediakan mekanisme insentif atau penghargaan bagi perangkat daerah/instansi yang mengadopsi hasil kajian dalam program atau kebijakan.	akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam penerapan hasil kajian. 3. Mengoptimalkan diseminasi, publikasi, dan aksesibilitas hasil kajian agar mudah dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. Meningkatkan kualitas dan relevansi kajian agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan provinsi maupun kabupaten/kota .
		Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	1. Menyusun peta kebutuhan inovasi yang sesuai dengan isu strategis pembangunan daerah. 2. Mendorong setiap perangkat daerah untuk	1. Mendorong pengembangan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. 2. Memperkuat ekosistem

No .	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			mengembangkan inovasi dalam program/kegiatan pelayanan publik. 3. Mengembangkan mekanisme insentif, penghargaan, dan kompetisi inovasi bagi perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha. 4. Memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, dan komunitas inovasi. 5. Membangun sistem informasi inovasi daerah yang terintegrasi dan mudah diakses. 6. Melakukan pendampingan, pelatihan, dan inkubasi inovasi bagi perangkat daerah maupun masyarakat. 7. Melakukan monitoring, evaluasi, dan replikasi terhadap inovasi yang telah berhasil diimplementasikan . 8. Memperkuat dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang pro-inovasi.	inovasi daerah melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. 3. Mengoptimalkan fasilitasi, inkubasi, dan pendampingan inovasi daerah. 4. Meningkatkan diseminasi dan replikasi inovasi yang berhasil untuk diterapkan secara lebih luas. 5. Memastikan keberlanjutan inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah.
		Terwujudnya Kualitas	1. Menyusun standar pelayanan publik yang jelas, terukur,	1. Meningkatkan tata kelola pelayanan

No .	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	dan sesuai kebutuhan. 2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi kompetensi. 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital yang mudah diakses, cepat, dan terintegrasi. 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk perbaikan kualitas layanan. 5. Memperkuat mekanisme pengaduan, aspirasi, dan tindak lanjut layanan publik yang transparan. 6. Membangun budaya kerja berbasis integritas, kedisiplinan, dan orientasi hasil. 7. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara sistematis dengan prinsip akuntabilitas. 8. Memberikan penghargaan bagi unit/pegawai yang berprestasi dalam peningkatan	publik yang transparan, efektif, dan berbasis kinerja. 2. Memperkuat kompetensi SDM BRIDA dalam mendukung pelayanan publik yang inovatif. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan. 4. Mendorong budaya kerja yang berintegritas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 5. Memastikan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik.

No .	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kualitas pelayanan publik.	

Sumber: Renstra BRIDA Provinsi Jambi 2025-2029

1.1.5. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) adalah instrumen resmi yang berisi penugasan dari pimpinan instansi pada tingkat yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi pada tingkat yang lebih rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang telah ditetapkan, lengkap dengan indikator kinerjanya. Melalui perjanjian ini, terbentuk komitmen dari pihak penerima amanah serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah mengenai capaian kinerja yang terukur, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya. Dokumen tersebut secara substansial memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, serta alokasi anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan dan evaluasi kinerja instansi.

Beberapa poin penting dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 adalah:

1. Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Target: Efisiensi operasional dan administrasi kelembagaan minimal 95%.
- Realisasi: Mendukung kelancaran operasional dengan tingkat efisiensi tinggi.

2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Target: Penyusunan minimal 10 kajian strategis di sektor pemerintahan, sosial, ekonomi, dan pembangunan.
- Realisasi: Sebagian besar kajian telah diselesaikan dengan capaian hampir sempurna.

3. Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Target: Penerapan minimal 5 model inovasi daerah, fasilitasi 3 hak kekayaan intelektual, dan diseminasi hasil riset.

- Realisasi: Seluruh target tercapai dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan koordinasi lintas unit.

1.1.6. Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan KUA-PPAS yang diberikan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi mendapat pagu anggaran sebesar Rp.10.720.242.863,00 dan terdapat Perubahan Anggaran pada APBD sebesar Rp.1.332.064.587,00 jadi alokasi APBD Perubahan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.9.388.178.276,00. Mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi mempunyai 2 Program dan 10 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan, terdiri dari:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi 7 kegiatan, yaitu:
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.194.664.140.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.7.653.778.611.
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.243.786.439,60.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.255.040.642,40.
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.186.733.168,00.
- II. Program Penelitian dan Pengembangan, meliputi 4 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.146.820.400.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.132.530.000.
3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.161.511.550.
4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.396.527.325.

Tabel 7 Perbandingan Anggaran Murni dan Perubahan BRIDA Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah perubahan	Tahapan Pelaksanaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.328.827.500,00	Rp.184.595.140,00	
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.10.292.500,00	Rp.4.117.000,00	
3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.14.880.000,00	Rp.5.952.000,00	
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp7.653.778.611,00	Rp7.653.778.611,00	
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp.42.215.000,00	Rp.16.786.000,00	1.Mencatat Kebutuhan



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah perubahan	Tahapan Pelaksanaan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi			2. Menugaskan Pegawai mengikuti Diklat 3. Mengadministrasi dan Menyusun SPJ
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.9.482.400,00	Rp.3.787.960,00	1. Mencatat Kebutuhan 2. Melakukan Pembelian dan Menyusun SPJ 3. Menyimpan dan Mengurus komponen Instalasi Listrik 4. Mendistribusikan komponen instalasi listrik
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.86.560.600,00	Rp.56.169.800,00	1. Mencatat Kebutuhan 2. Membeli dan Menyusun SPJ 3. Menyimpan dan Mengurus Barang Alat Tulis Kantor. 4. Mendistribusikan Alat Tulis Kantor.
3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.22.891.849,00	Rp.9.523.539,60	1. Mencatat Kebutuhan 2. Membeli dan Menyusun SPJ 3. Menyimpan dan Mengurus Barang Cetak dan Penggandaan 4. Mendistribusikan Barang Cetak dan Penggandaan
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.325.790.880,00	Rp.174.305.140,00	1. Mencatat Kebutuhan 2. Melakukan Pembelian dan Menyusun SPJ
5. Pengadaan Barang Milik Daerah			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah perubahan	Tahapan Pelaksanaan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.15.900.000,00	Rp.0	1. Proses Kontrak 2. Pembayaran
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.160.000.633,00	Rp.145.057.244,70	1. Mendata jumlah kebutuhan sesuai dengan tagihan pembayaran 2. Melakukan pembayaran tagihan per bulan sesuai dengan <i>print out</i> faktur tagihan
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.149.543.570,00	Rp.109.983.397,00	3. Melakukan Persiapan 4. Pelaksanaan Kegiatan 5. Kegiatan Pelaporan 6. Evaluasi Kegiatan
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.307.878.520,00	Rp.155.593.168,00	1. Persiapan 2. Pelaksanaan Kontrak 3. Kegiatan Pelaporan 4. Evaluasi
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp31.990.000,00	Rp.31.140.000,00	1. Persiapan 2. Pelaksanaan Kontrak 3. Kegiatan Pelaporan 4. Evaluasi
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah perubahan	Tahapan Pelaksanaan
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Rp.112.271.800,00	Rp.72.824.650,00	
2) Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rp.118.184.800,00	Rp.73.995.750,00	
9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.177.000.000,00	Rp.132.530.000,00	
10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp.144.087.000,00	Rp.76.668.800,00	
2) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Rp.136.369.600,00	Rp.84.842.750,00	
11. Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
1) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model	Rp.632.741.000,00	Rp.250.871.150,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah perubahan	Tahapan Pelaksanaan
Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
2) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp.175.456.600,00	Rp.108.750.375,00	
3) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Rp.80.000.000,00	Rp.36.905.800,00	

Sumber: BRIDA Provinsi Jambi, 2025

1.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan PK instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Kepala Balitbangda Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Riset	Persentase Policy Brief yang dimanfaatkan	72%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	70,01 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Angka
3.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60,25 Angka

Sumber: Renstra Balitbangda 2021-2026

Selain PK tersebut di atas pada tahun 2025 yang merupakan periode transisi Renstra 2021 - 2026 dan Renstra 2025 - 2029, maka telah disusun PK Kepala BRIDA sesuai dengan Renstra baru tahun 2025 -2029 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Kepala BRIDA Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam	Persentase Kebijakan Berbasis bukti	72%



No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Mendukung pembangunan Daerah		

Sumber: Renstra BRIDA 2025-2029

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan membahas lebih detail tentang kinerja aktual Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 yang sebelumnya sudah direncanakan melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan lebih lanjut dituangkan ke dalam kontrak kerja berupa Perjanjian Kinerja (PK) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sebagai pijakan utama dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, serta dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi SKPD. Proses pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis, dengan berlandaskan pada seperangkat indikator kinerja kegiatan yang mencakup indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, hingga dampak.

Penilaian tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian proses yang berlangsung, yaitu kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran, maupun dari evaluasi yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan, program, atau kegiatan. Proses tersebut dipandang penting karena memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengukuran kinerja bukan hanya berfungsi sebagai alat evaluasi administratif, tetapi juga sebagai mekanisme substantif yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar relevan, efektif, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi organisasi perangkat daerah.

Pengukuran kinerja mencakup dua dimensi utama, yaitu:

1. **Kinerja kegiatan**, yang menggambarkan tingkat pencapaian target atau rencana capaian dari setiap kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. **Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah**, yang menunjukkan realisasi target atau rencana capaian dari masing-

masing indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran atas pencapaian sasaran tersebut didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan langsung antara capaian kegiatan dan pencapaian sasaran organisasi.

Dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah, digunakan suatu skala pengukuran kinerja yang bersifat umum. Skala ini berfungsi sebagai acuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran instansi pemerintah. Secara umum, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Skala Pengukuran Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	$\geq 90-100$	Sangat Memuaskan
2.	A	$\geq 80-89$	Memuaskan
3.	BB	$\geq 70-79$	Sangat Baik
4.	B	$\geq 60-69$	Baik
5.	CC	$\geq 50-59$	Cukup
6.	C	$\geq 30-49$	Kurang

Untuk itu, dengan adanya skala tersebut, evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur, dan konsisten, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun kelemahan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

Adapun capaian kinerja sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat dilihat dari form pengukuran kinerja.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 11 Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti	75 %	75%	100%

Sumber: BRIDA Provinsi Jambi, 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi menetapkan sasaran strategis berupa *meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah*. Sasaran ini menjadi landasan penting bagi BRIDA dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah memiliki basis ilmiah yang kuat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut adalah ***“Persentase Kajian Berbasis Bukti”***. Indikator ini dipilih karena mencerminkan sejauh mana hasil kajian ilmiah dan riset yang dilakukan BRIDA benar-benar dimanfaatkan dalam proses perumusan kebijakan daerah. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mengukur output berupa jumlah kajian, tetapi juga outcome berupa tingkat pemanfaatan kajian dalam mendukung pengambilan keputusan.

Pada tahun anggaran 2025, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar **75%**, dengan realisasi capaian yang juga mencapai **75%**. Kesamaan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa BRIDA mampu memenuhi seluruh rencana yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar **100%**. Pencapaian penuh ini menegaskan komitmen BRIDA dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program riset dan inovasi, sekaligus memastikan bahwa kajian berbasis bukti benar-benar menjadi instrumen utama dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Strategi pencapaian indikator ini dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, antara lain:

1. **Penguatan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi**, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan mitra strategis lainnya.
2. **Peningkatan kualitas kajian berbasis bukti**, melalui penerapan metodologi penelitian yang sesuai standar akademik, serta memastikan relevansi kajian terhadap isu-isu pembangunan prioritas daerah.
3. **Optimalisasi pemanfaatan hasil kajian dalam kebijakan**, dengan mendorong integrasi hasil riset ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta melakukan advokasi kepada perangkat daerah agar hasil kajian dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan.
4. **Monitoring dan evaluasi berkelanjutan**, guna memastikan bahwa setiap kajian yang dihasilkan tidak hanya selesai pada tahap penyusunan, tetapi juga benar-benar digunakan dalam praktik kebijakan.

Kontribusi capaian ini terhadap visi dan misi daerah sangat signifikan. Dengan meningkatnya pemanfaatan kajian berbasis bukti, kebijakan pembangunan daerah menjadi lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, serta memperkuat daya saing daerah melalui inovasi.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja utama ini menunjukkan bahwa BRIDA Provinsi Jambi telah berhasil menjalankan perannya sebagai motor penggerak riset dan inovasi, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan.

2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023.

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian 2025	
		2023	2024	Target	Realisasi
1.	Nilai AKIP	67,65	64,85	69,95	Dalam penilaian
2.	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	65%	70%	75%	75%

Sumber: BRIDA Provinsi Jambi, 2025

B. Realisasi Anggaran

Analisis Program dan Kegiatan BRIDA Provinsi Jambi Tahun 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Capaian Kinerja

Secara umum, kegiatan dalam bidang ini menunjukkan tingkat realisasi keuangan di atas **69%** dengan capaian fisik **100%**, menandakan bahwa seluruh kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai target meskipun terdapat variasi dalam tingkat penyerapan anggaran.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mencapai **98,67% keuangan dan 100% fisik**, menandakan efektivitas tinggi dalam perencanaan program dan kegiatan.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD relatif rendah dengan realisasi keuangan **69,60%**, meskipun capaian fisik tetap **100%**, menunjukkan adanya keterlambatan atau kendala dalam proses koordinasi lintas unit.

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terealisasi 76,59% keuangan dan 100% fisik, lebih baik dibanding RKA namun masih belum optimal.

- Analisis

1. Efektivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tingginya capaian penyusunan dokumen perencanaan menunjukkan bahwa BRIDA mampu menjalankan fungsi perencanaan dengan baik, sehingga dokumen perencanaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.

2. Kendala dalam Koordinasi RKA-SKPD

Rendahnya realisasi keuangan pada koordinasi RKA-SKPD (69,60%) mengindikasikan adanya hambatan dalam proses koordinasi antar perangkat daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh keterlambatan input data, perbedaan prioritas antar unit, atau keterbatasan sumber daya.

3. Penyusunan DPA-SKPD

Realisasi 76,59% menunjukkan bahwa meskipun dokumen DPA berhasil disusun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penganggaran agar lebih optimal.

4. Implikasi terhadap Kinerja SKPD

Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi merupakan fondasi penting bagi kinerja SKPD. Tingginya capaian pada penyusunan dokumen perencanaan memperkuat dasar perencanaan pembangunan, namun koordinasi yang belum optimal dapat memengaruhi kualitas implementasi program di lapangan.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Capaian Kinerja

Kegiatan utama dalam bidang ini adalah **penyediaan gaji dan tunjangan ASN**, yang menyerap anggaran terbesar yaitu **Rp 7,65 miliar**. Realisasi keuangan mencapai **85,46%**, sedangkan capaian fisik berada pada angka **83,65%**. Meskipun tergolong tinggi, masih terdapat sisa anggaran yang signifikan sebesar **Rp 1,11 miliar**, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan pegawai dengan realisasi aktual. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** mencapai **98,67% keuangan dan 100% fisik**, menandakan efektivitas tinggi dalam perencanaan program dan kegiatan.

- Analisis

1. Efektivitas Pelaksanaan

Tingkat realisasi di atas 80% menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan ASN telah terpenuhi. Namun, capaian ini belum optimal karena masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar.

2. Kendala Perencanaan Anggaran

Sisa anggaran Rp 1,11 miliar mengindikasikan adanya kelemahan dalam akurasi perencanaan kebutuhan pegawai. Hal ini bisa disebabkan oleh perubahan jumlah pegawai, penyesuaian tunjangan, atau keterlambatan dalam proses administrasi pembayaran. Penyusunan DPA-SKPD

3. Implikasi terhadap Kinerja SKPD

Ketidaktepatan perencanaan anggaran dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Jika tidak segera diperbaiki, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran untuk program lain yang lebih produktif.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Capaian Kinerja

Kegiatan utama dalam bidang ini adalah **pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**, dengan realisasi keuangan dan fisik sebesar **83,68%**. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar program pengembangan sumber daya manusia (SDM) telah terlaksana, namun belum mencapai target penuh.

- Analisis

1. Efektivitas Pelaksanaan

Realisasi di atas 80% menandakan bahwa program pendidikan dan pelatihan pegawai berjalan cukup baik. Namun, capaian yang belum optimal menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan penuh, baik dari sisi teknis maupun administratif.

2. Kendala Pelaksanaan

Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi capaian antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan, penyesuaian jadwal dengan tugas pokok pegawai, serta keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya jumlah pegawai yang dapat mengikuti program secara menyeluruh.

3. Implikasi terhadap Pengembangan SDM

Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur. Capaian yang belum maksimal dapat berdampak pada keterbatasan peningkatan kapasitas pegawai, sehingga perlu perhatian khusus agar kualitas SDM BRIDA tetap terjaga.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Capaian Kinerja

Hampir seluruh kegiatan administrasi umum menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi, rata-rata di atas **99%**, dengan capaian fisik yang konsisten.

- **Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terealisasi 99,70%.**
- **Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor mencapai 99,71%.**
- **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terealisasi 99,78%.**
- **Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bahkan terealisasi penuh (100%).**

- Analisis

1. Efisiensi Pengelolaan Operasional

Tingginya capaian menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan kebutuhan operasional kantor. BRIDA mampu memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar administrasi terpenuhi dengan baik, tepat waktu, dan sesuai perencanaan.

2. Dukungan terhadap Kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi

Kegiatan administrasi umum berperan sebagai penunjang utama kelancaran pelaksanaan program riset dan inovasi. Dengan capaian hampir sempurna, BRIDA berhasil menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas pegawai.

3. Keterkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan

Efektivitas administrasi umum mencerminkan tata kelola internal yang baik. Hal ini mendukung prinsip akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan anggaran, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap kinerja BRIDA.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Capaian Kinerja

Kegiatan penyediaan jasa penunjang menunjukkan capaian yang bervariasi:

1. **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik** terealisasi **72,88% keuangan** dengan capaian fisik **100%**, menyisakan anggaran sebesar Rp 39,33 juta.
2. **Penyediaan jasa pelayanan umum kantor** hampir sempurna dengan realisasi **99,94% keuangan dan fisik**, menyisakan anggaran yang sangat kecil.

- Analisis

1. Efisiensi dan Keterbatasan Penggunaan

Rendahnya realisasi keuangan pada jasa komunikasi, air, dan listrik menunjukkan adanya efisiensi penggunaan atau keterbatasan kebutuhan aktual dibandingkan dengan perencanaan awal. Hal ini bisa disebabkan oleh penghematan energi, penyesuaian tarif, atau optimalisasi penggunaan fasilitas kantor.

2. Kinerja Pelayanan Umum Kantor

Capaian hampir sempurna pada jasa pelayanan umum kantor menunjukkan bahwa BRIDA mampu mengelola kebutuhan operasional dengan sangat baik. Hal ini mendukung kelancaran aktivitas harian dan memastikan pelayanan administrasi berjalan tanpa hambatan.

3. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Perbedaan capaian antara dua jenis jasa penunjang memperlihatkan bahwa BRIDA cukup adaptif dalam mengelola kebutuhan operasional. Namun, perlunya evaluasi lebih lanjut

terhadap perencanaan anggaran jasa komunikasi dan listrik agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Capaian Kinerja**

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah menunjukkan capaian yang tinggi dengan sisa anggaran minimal:

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas terealisasi 95,45% keuangan dan fisik, menyisakan Rp 7,08 juta.
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya mencapai 99,81% keuangan dan fisik, dengan sisa anggaran hanya Rp 60 ribu.

- **Analisis**

1. **Efisiensi Pelaksanaan**

Tingkat realisasi di atas 95% menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan berjalan efektif dan sesuai rencana. BRIDA mampu menjaga kondisi kendaraan dinas serta peralatan operasional agar tetap berfungsi optimal.

2. **Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Sisa anggaran yang sangat kecil menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan pemeliharaan. Hal ini mencerminkan ketepatan perencanaan kebutuhan serta disiplin dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan

- **Capaian Kinerja**

Kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan serta pengkajian peraturan menunjukkan tingkat realisasi keuangan **lebih dari 99%** dengan

capaian fisik **100%**. Angka ini menandakan bahwa hampir seluruh rencana kerja telah terlaksana sesuai target, mencerminkan efektivitas tinggi dalam pelaksanaan program.

Secara khusus, kegiatan **fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian bidang keuangan, aset daerah, serta reformasi birokrasi** terealisasi **99,52%**, sedangkan **perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan evaluasi pelaksanaan peraturan** mencapai **99,45%**.

- Analisis

1. **Efektivitas Pelaksanaan**

Tingkat realisasi yang sangat tinggi menunjukkan bahwa BRIDA mampu mengelola kegiatan penelitian pemerintahan dan peraturan dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

2. **Dukungan terhadap Reformasi Birokrasi**

Penelitian di bidang keuangan, aset daerah, dan reformasi birokrasi memberikan kontribusi nyata dalam mendukung agenda reformasi birokrasi. Data dan rekomendasi yang dihasilkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas.

3. **Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti**

Kegiatan perumusan rekomendasi atas peraturan baru maupun evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang ada memperlihatkan peran BRIDA sebagai lembaga riset yang mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dengan capaian ini, BRIDA berhasil menyediakan masukan yang relevan bagi penyusunan regulasi daerah.

b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- **Capaian Kinerja**

Kegiatan penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan terdiri atas dua fokus utama:

1. **Penelitian Pertanian, Perkebunan, dan Pangan** dengan realisasi keuangan **97,35%** dan capaian fisik **97,35%**, menyisakan anggaran sebesar Rp 2,03 juta.
2. **Penelitian Pekerjaan Umum** dengan realisasi keuangan **99,88%** dan capaian fisik **99,88%**, hampir sempurna tanpa hambatan berarti.

- **Analisis**

1. **Efektivitas Pelaksanaan**

Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan penelitian di sektor ekonomi dan pembangunan telah berjalan sesuai rencana. Walaupun penelitian pertanian dan pangan belum mencapai 100%, capaian di atas 97% tetap menandakan efektivitas yang baik.

2. **Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah**

Penelitian pertanian, perkebunan, dan pangan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah serta peningkatan produktivitas sektor unggulan Jambi.

Penelitian pekerjaan umum memberikan masukan strategis bagi pembangunan infrastruktur, yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. **Dukungan terhadap Kebijakan Berbasis Bukti**

Hasil penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan menyediakan data empiris yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih

tepat sasaran, baik dalam sektor agribisnis maupun infrastruktur.

4. Kendala dan Tantangan

Masih terdapat sisa anggaran pada penelitian pertanian dan pangan, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan.

Tantangan ke depan adalah memastikan hasil penelitian benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

c. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Capaian Kinerja

Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi menunjukkan capaian yang sangat tinggi, dengan rata-rata realisasi keuangan di atas **98%** dan capaian fisik mendekati **100%**. Lebih lanjut, di dalam kegiatan ini terdapat tiga sub kegiatan antara lain;

- a. Sub Kegiatan Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi serta invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi dengan realisasi keuangan sebesar **98,67%** dan **100%** fisik. Hal ini menandakan keberhasilan dalam mendorong penerapan teknologi baru di daerah.
- b. Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan mencapai **99,94%**, menunjukkan komitmen BRIDA dalam memperluas pemahaman dan pemanfaatan hasil riset.
- c. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terealisasi **99,27%**, memperlihatkan dukungan nyata terhadap perlindungan hasil riset dan inovasi masyarakat Jambi.

- Analisis

1. Efektivitas Pelaksanaan

Tingkat realisasi yang sangat tinggi menunjukkan bahwa program inovasi dan teknologi telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. BRIDA berhasil mengoptimalkan

anggaran untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penguatan ekosistem inovasi daerah.

2. Dukungan terhadap difusi Inovasi

Uji coba dan penerapan model inovasi menjadi bukti bahwa BRIDA tidak hanya menghasilkan riset, tetapi juga mendorong penerapan nyata di lapangan. Hal ini memperkuat posisi BRIDA sebagai lembaga yang berperan dalam hilirisasi hasil penelitian.

3. Perlindungan Kekayaan Intelektual

Fasilitasi HKI menunjukkan komitmen BRIDA dalam melindungi hasil riset dan inovasi masyarakat. Dengan capaian hampir sempurna, BRIDA berhasil mendukung peneliti, akademisi, dan pelaku usaha dalam memperoleh hak atas karya inovatif mereka.

4. Diseminasi Hasil Riset

Sosialisasi hasil kelitbangan yang mencapai hampir 100% memperlihatkan bahwa BRIDA aktif menyebarluaskan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan, sehingga hasil riset dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 13 Tabel 1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BRIDA Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2025

No ·	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisa si Fisik	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	(%)	(%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	184.595.140	182.132.258	98,67	100	2.462.882
B	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.117.000	2.865.600	69,60	100	1.251.400
C	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.952.000	4558800	76,59	100	1.393.200

No ·	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisa si Fisik	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	(%)	(%)	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.653.778.6 11	6.541.168.2 48	85,4 6	83,65	1.112.610.3 63
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
A	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.786.000	14.045.760	83,6 8	83,68	2.740.240
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	3.787.960	3.776.500	99,7 0	99,70	11.460
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.169.800	56.005.157	99,7 1	99,71	164.643
C	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.523.539	9.503.051	99,7 8	99,78	20.488
D	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.305.140	174.305.140	100	100	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
A	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.057.244	105.718.539	72,8 8	100	39.338.705
B	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.983.397	109.917.937	99,9 4	99,94	65.460
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	155.593.168	148.513.850	95,4 5	95,45	7.079.318

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	(%)		
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.140.000	31.080.000	99,81	99,81	60.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					
A	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	72.824.650	72.084.890	99,52	100	350.000
B	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	73.995.750	73.590.450	99,45	100	405.300
8	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					
A	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	132.530.000	131.309.167	99,08	100	1.220.833
9	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					
A	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	76.668.800	74.638.800	97,35	97,35	2.030.000
B	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	84.842.750	84.742.750	99,88	99,88	100.000
10	Pengembangan Inovasi dan Teknologi					

No .	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisa si Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	(%)		
A	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	250.871.150	247.528.150	98,6 7	100	3.343.000
B	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	108.750.375	108.680.092	99,9 4	99,94	70.283
C	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	36.905.800	36.636.299	99,2 7	99,27	269.501

Sumber: BRIDA Provinsi Jambi, 2025

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) **Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi Tahun 2025** merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta kontribusi BRIDA terhadap pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.

Secara umum, capaian kinerja BRIDA menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Sebagian besar kegiatan berhasil mencapai realisasi keuangan dan fisik di atas 95%, dengan beberapa kegiatan bahkan terealisasi penuh (**100%**). Hal ini mencerminkan komitmen BRIDA dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga riset dan inovasi daerah yang mendukung kebijakan berbasis bukti (*Evidence-Based Policy*).

Keberhasilan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** menunjukkan efisiensi tinggi dalam perencanaan, penganggaran, administrasi, serta pemeliharaan aset. Hampir seluruh kegiatan administrasi umum mencapai realisasi di atas **99%**, menandakan pengelolaan operasional yang efektif.
- **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** berhasil menghasilkan kajian strategis di bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, dan pembangunan dengan capaian hampir sempurna. Penelitian pendidikan dan kebudayaan mencapai **99,08%**, sementara penelitian pekerjaan umum mencapai **99,88%**, memperlihatkan kontribusi nyata terhadap kebijakan sosial dan pembangunan infrastruktur.
- **Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi** menunjukkan capaian di atas **98%**, dengan keberhasilan dalam uji coba model inovasi, diseminasi hasil riset, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual. Hal ini memperkuat ekosistem inovasi daerah dan mendukung hilirisasi hasil penelitian.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang:

- Koordinasi lintas unit dalam penyusunan RKA-SKPD masih relatif rendah (69,60%), sehingga perlu peningkatan integrasi antar perangkat daerah.
- Perencanaan kebutuhan pegawai belum sepenuhnya akurat, terlihat dari sisa anggaran signifikan pada gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 1,11 miliar.
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai baru mencapai 83,68%, menunjukkan perlunya optimalisasi program pengembangan SDM.
- Efisiensi penggunaan jasa komunikasi, air, dan listrik masih perlu ditingkatkan, dengan realisasi hanya 72,88%.

Komitmen Perbaikan

BRIDA Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja. Ke depan, langkah-langkah strategis yang akan ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan akurasi perencanaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil, khususnya dalam pengelolaan ASN dan operasional kantor.
2. Memperkuat koordinasi lintas SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
3. Mengoptimalkan program pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
4. Mendorong hilirisasi hasil riset dan inovasi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan capaian kinerja yang tinggi dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, BRIDA Provinsi Jambi semakin memperkuat perannya sebagai lembaga riset dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah berbasis pengetahuan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus inspirasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat



daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat Jambi.

Jambi, Desember 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jambi




H. Sri ARGUNAINI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660722 199303 2 004

Lampiran I Perjanjian Kinerja

Bagan 1 Perjanjian Kinerja (Awal) Kepala BRIDA Provinsi Jambi



Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IR. HJ. SRI ARGUNAINI, M.SI.

Jabatan : PLT. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H

Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

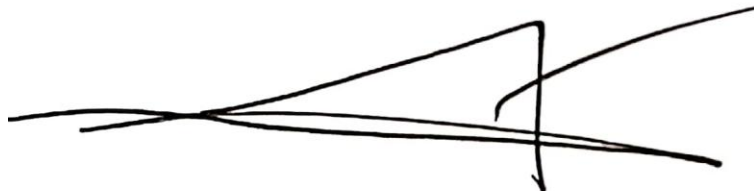
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama



DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI



IR. HJ. SRI ARGUNAINI, M.SI.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 196607221993032004

Bagan 2 Perjanjian Kinerja (Awal) Kepala BRIDA Provinsi Jambi (Lampiran)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hasil Riset	Persentase Policy Brief yang Dimanfaatkan	72 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	70.01 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Angka
3	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60.25 Angka

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.576.110.800	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.160.032.063	

Jambi, 31 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI

PLT. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI

IR. HJ. SRI ARGUNAINI, M.ST.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 196607221993032004

Bagan 3 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kepala BRIDA Provinsi Jambi



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.**

Jabatan : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.**

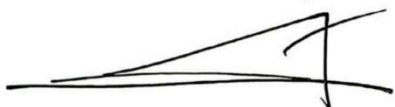
Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.

Jambi, 10 September 2025

Pihak Pertama,



Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660722 199303 2 004

**Bagan 4 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kepala BRIDA Provinsi Jambi (Lampiran)**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BRIDA PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	75 %

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	837.389.275	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	8.550.789.001	APBD

Pihak Kedua,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Pihak Pertama,

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660722 199303 2 004



Lampiran II Realisasi Capaian Kinerja BRIDA Provinsi Jambi

Tabel 14 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan BRIDA Provinsi Jambi Tahun 2025

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Nilai AKIP 2. Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik 3. Nilai IKM	Indeks		1. 64,85 2. 86,84 3. 89,797	8.550.789.001,00	7.422.833.783 (86,81 %)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	7	7	194.664.140,00	189.556.658
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen	1	1	7.653.778.611,00	6.541.168.248
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen	1	1	16.786.000,00	14.045.760
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen	1	1	243.786.439,60	243.589.848
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	1	1	255.040.642,40	252.661.719
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	1	1	186.733.168,00	181.811.550
II	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	75	75	837.389.275	829.200.694 (99,02 %)
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Laporan	2	2	146.820.400	145.675.340
2	Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Laporan	1	1	132.530.000	131.309.167



No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
3	Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Laporan	3	3	161.511.550	159.381.549
4	Pengembangan inovasi dan teknologi		Laporan	3	3	396.527.325	392.834.638
Jumlah						9.388.178.276	8.252.034.477

Sumber: BRIDA Provinsi Jambi, 2025



Lampiran III Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

Lampiran : I
Nomor : 38 / KEP/BRIDA-1.1/IX/2025
Tanggal : 17 September 2025

Tabel 15 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025

No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
1.	Membuat Renja Perubahan Tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana	Membuat dan menyampaikan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 kepada kepala Bappeda Provinsi Jambi untuk diverifikasi	1 Dokumen	Bulan Juli sampai dengan Desember 2025	BRIDA Provinsi Jambi	November 2025



No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
	Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah					
2	Memformalkan pohon kinerja dan/atau cascading kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan	Memformalkan pohon kinerja dan /atau cascading kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja	1 Dokumen	Bulan Juli sampai dengan Desember 2025	BRIDA Provinsi Jambi	November 2025
3	Membuat dokumen Evaluasi Capaian Kinerja per triwulan dalam bentuk Dokumen per triwulan sehingga capaian kinerja yang dilampirkan lebih terstruktur dan terinci	Akan membuat dokumen Evaluasi Capaian Kinerja per triwulan	4 Dokumen	Triwulan : April, Juli, Oktober, Desember	BRIDA Provinsi Jambi	Desember 2025
4	Melakukan rewiu dan perbaikan rumusan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil sesuai level jabatan dari level jabatan	Secara berkala akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau capaian kinerja untuk setiap level organisasi untuk	4 Laporan	Triwulan : April, Juli, Oktober,	BRIDA Provinsi Jambi	Selesai Triwulan 1 (Monev di



No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
	tertinggi hingga ke level operasional	perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektivitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja		Desember		bulan April 2024) Triwulan 2 (pelaporan di bulan Juli 2024) Triwulan 3 (pelaporan dibulan Oktober Triwulan 4 (pelaporan dibulan Desember)
5	Menyajikan informasi terkait faktor keberhasilan capaian kinerja, hambatan dan upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kinerja dalam dokumen	Akan menyajikan informasi terkait faktor keberhasilan capaian kinerja, hambatan dan upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kinerja dalam laporan Monev renja triwulan	4 Laporan	Triwulan : April, Juli, Oktober, Desember	BRIDA Provinsi Jambi	Selesai Triwulan 1 (Monev di bulan April 2024) Triwulan 2



No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
	pengukuran kinerja (laporan Monev renja triwulan)					(pelaporan di bulan Juli 2024) Triwulan 3 (pelaporan di bulan Oktober) Triwulan 4 (pelaporan di bulan Desember)
6	Melakukan pengukuran kinerja dengan tepat waktu serta membuat notulen rapat dan daftar hadir rapat pengukuran kinerja (laporan Monev renja triwulan) dan harus selaras dengan E PAKET JAMBI	Akan melampirkan notulen rapat dan daftar hadir rapat pengukuran kinerja dalam laporan Monev triwulan serta menyelaraskannya dengan E-PAKET Jambi	4 Laporan	Triwulan : April, Juli, Oktober, Desember	BRIDA Provinsi Jambi	Selesai Triwulan 1 (Monev di bulan April 2024) Triwulan 2 (pelaporan di bulan Juli 2024)

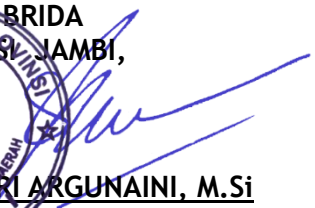


No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
						Triwulan 3 (pelaporan dibulan Oktober Triwulan 4 (pelaporan dibulan Desember)
7	Menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi pada lingkup unit kerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja	Akan menyusun kebijakan terkait hasil pengukuran kinerja	1 Dokumen	Desember 2025	BRIDA Provinsi Jambi	Desember 2025
8	Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound)	Akan menyempurnakan indikator kinerja sesuai dengan kriteria SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound)	1 Dokumen	Desember 2025	BRIDA Provinsi Jambi	Desember 2025



No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
9	Membuat Pedoman Umum evaluasi Akip Internal	Akan membuat pedoman umum evaluasi AKIP internal	1 Dokumen	Desember 2025	BRIDA Provinsi Jambi	Desember 2025
10	Membuat Laporan evaluasi internal SAKIP/SOP Mekanisme evaluasi SAKIP	Akan membuat laporan evaluasi internal SAKIP/SOP Mekanisme evaluasi SAKIP	1 Laporan	Desember 2025	BRIDA Provinsi Jambi	Desember 2025
11	Rekomendasi LHE tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti secara keseluruhan dan di formalkan	Akan memformalkan rekomendasi LHE tahun 2024	1 Dokumen	Desember 2025	BRIDA Provinsi Jambi	Desember 2025

Sumber: BRIDA Provinsi Jambi, 2026

KEPALA BRIDA
PROVINSI JAMBI,

Hi SRI ARGUNAINI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660722 199303 2 004

Lampiran IV Kegiatan BRIDA Tahun 2025



Bagan 5 Penyerahan Kajian Kebijakan Deputy Riset dan Inovasi Daerah Kepada Pemerintah Daerah



Bagan 6 Penganugerahan Kinerja dalam Bidang Inovasi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025

**BADAN
RISET DAN
INOVASI
DAERAH
PROVINSI
JAMBI**